
**TEMUAN AUDIT: DETERMINAN DAN HUBUNGANNYA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA**

**Masculine Muhammad Muqorobin
Totok Susilo Pamuji Nugroho
Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta**

ABSTRACT

The objective of this study is to find empirical evidence about the determinants and the relationship with the financial quality reporting of Local Government Financial Report in Indonesia on 2010th budgeted year. The Factors used in this study are Local Government revenue, BPK audit opinion on the Financial Government Financial Report, and Local Government assets.

This study use 480 Local Government Finance Report of 2010th budgeted year. Multiple regression analysis technique is used in analyzing the data. The results of this study show evidence that the number of BPK audit findings significantly affected significantly and moderately significantly by 2 of the 3 variables of the study. These variables are Local Government revenue, BPK audit opinion on the Financial Government Financial Report and the others is does not affect total BPK audit findings on Local Government Finance Report of 2010th budgeted year.

Keywords: *BPK audit findings, local government financial report, Agency Theory, local government.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai determinan dan hubungannya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2010. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendapatan pemerintah daerah, opini audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan jumlah aset Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menggunakan 480 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2010. Teknik analisis regresi berganda digunakan dalam menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bukti bahwa jumlah temuan audit BPK dipengaruhi secara signifikan dan signifikan secara moderat oleh 2 dari 3 variabel penelitian. Variabel-variabel tersebut diantaranya adalah pendapatan pemerintah daerah, dan opini audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan variabel jumlah aset pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap jumlah temuan audit BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2010.

Kata Kunci: *Temuan Audit BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Teori Agensi, Pemerintah Daerah.*

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam menjalankan amanahnya sebagai pengelola pemerintahan dalam bentuk angka- angka akuntansi (PSAP No 24 Tahun 2005). Lebih lanjut lagi PSAP No 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu- satunya lembaga yang diberikan wewenang untuk memeriksa laporan keuangan Pemerintahan menghasilkan sebuah laporan yang dinamakan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Di dalam laporan inilah, BPK memberikan opini serta temuan hasil pemeriksaannya mengenai kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Sarbanes- Oxley Act memberikan mandat kepada auditor perusahaan yang dimiliki publik untuk menkomunikasikan kebijakan akuntansi dan prakteknya terhadap pengendalian internal dimana BPK selaku audit pemerintahan juga berwenang untuk bisa mengkomunikasikan hal yang sama di pemerintahan daerah.

(Ge & Mcvay, 2005) yang meneliti dan mengidentifikasi tentang kelemahan yang material dalam pengendalian internal 261 perusahaan di Amerika berdasarkan pengajuan SEC dari Agustus 2002 sampai November 2004 dalam menanggapi seksi 302 tentang persyaratan Sarbaness Oxley Act (SOX) menemukan bahwa dari 55 sampel perusahaan yang diteliti ditemukan bahwa kelemahan material pada pengendalian internal terdapat pada kebijakan dan prosedur pendapatan. Prosedur pendapatan biasanya terkait dengan waktu pengungkapan pendapatan dan praktik kontrak kerja. Pengendalian internal yang buruk biasanya dikaitkan dengan kurangnya personil yang berkualitas sehingga kelemahan material dalam pengendalian internal cenderung dikaitkan dengan kurangnya pelatihan personil, kurangnya kebijakan akuntansi dan pelaporan pada tiap akhir periode.

(Manson, McCartney, & Sherer, 2001) dalam penelitiannya yang mengidentifikasi masalah yang diangkat dalam *manajemen letter* dan menilai yang terdapat pada perusahaan *go public*, dan mengetahui nilai *manajemen letter* pada auditor menemukan bahwa konsentrasi auditor cenderung kepada aspek- aspek kunci dari akuntansi perusahaan dan sistem pengendalian internal daripada isu-isu rinci atau isu yang tidak penting. Semakin ketatnya persaingan pasar jasa audit mengakibatkan semua perusahaan audit harus lebih memperhatikan kebutuhan klien mereka yang menyebabkan ratanya kualitas opini yang diberikan dalam manajemen letter. Survei pada penelitian ini meminta perusahaan *go public* untuk lebih dapat mengukur manfaat dari management letter yang mereka terima dari auditor mereka. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Johnson, Lowensohn, Reck, & Davies, 2012) menemukan bahwa komentar pada *Management letter* berhubungan positif terhadap ukuran pemerintahan.

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti diatas, penulis merasa tertarik untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan Pemerintah Daerah, Jumlah Aset Pemerintah Daerah, dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap jumlah temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan dari *principal* dan *agent* dimana pihak yang disebut sebagai *principal* adalah masyarakat, sedangkan pihak yang dimaksud dengan *agent* adalah pemerintah yang mengelola pemerintahan. Inti dari hubungan keagenan ini adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di pihak masyarakat dan pengendalian di pihak Pemerintah.

Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi, diantaranya yaitu :

1. Asumsi tentang sifat manusia (*Human Assumptions*)

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat alami untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan

rasionalitas(*bounded rationality*), dan tidak menyukai atau cenderung untuk menghindari risiko(*risk aversion*).

2. Asumsi tentang keorganisasian(*Organizational Assumptions*)

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya ketidakseimbangan informasi(*Asymmetric Information*) antara prinsipal dengan agen.

3. Asumsi tentang informasi (*Information Assumptions*).

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang dapat diperjual belikan. Hal ini dikarenakan informasi secara material memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan(UU No. 17 Tahun 2003) Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) disusun berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh seluruh SKPD(Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Menurut Mardiasmo(2002), Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi disektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi *non-moneter* seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Dengan kata lain, Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintahan selain memiliki tujuan keuangan juga harus memiliki tujuan *non-keuangan* yang berbasis kinerja pelayanan publik.

3. Komunikasi audit

Penelitian yang dilakukan oleh (Cohen et al., 2006) menyediakan ulasan literatur yang dipadukan dengan penelitian akademis yang terkait dengan jenis-jenis aspek pada komunikasi dengan komite audit dan audit board. Penelitian pada artikel ini menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada pendekatan padalimahal, diantaranya adalah :

1. Kualitas Pelaporan Keuangan

Prioritas dari penelitian megusahakan informasi sebagai sarana komunikasi yang baik dengan komite audit selama auditor, komite audit dan badan yang lain membenahi kualitas pelaporan. Komunikasi dikatakan efektif apabila terjadi kesepakatan antara pihak yang terkait untuk meningkatkan laba manajemen dan faktor- faktor yang tidak termasuk dalam laporan keuangan.

2. Sewadan Pengawasan Auditor Eksternal

Prioritas dari penelitian ini mengindikasikan pentingnya auditor untuk berkomunikasi dengan komite audit dan semua pihak yang berkaitan dengan klien, honor auditor, jasa yang disediakan dan jasa lain yang menguntungkan audit.

3. Pelaporan pada sistem pengendalian

Sifat alami dan luasnya informasi antara auditor dan komite audit dan perubahan yang terjadi berdasarkan pengendalian atas kelemahan atau defisiensi yang terkait dengan tingkatan pengendalian.

4. Kesalahan pada auditor internal dan proses risiko manajemen

Komite audit dan auditor eksternal harus mendiskusikan kualitas atas fungsi audit internal dan apa saja yang dapat dipercayai dari auditor eksternal berdasarkan kinerjanya.

5. MD&A

MD & A menjadi salah satu komponen yang dibahas antara risiko bisnis dan kualitas secara keseluruhan pada proses pelaporan laporan keuangan. Diperlukan evaluasi pada setiap komponen dari MD & A akan menjadi hasil pada produksi manajemen.

4. Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik Pemerintah Daerah dapat diukur dengan berbagai cara, diantaranya seperti pengukuran pendapatan pemerintah daerah melalui total Pendapatan Asli Daerah (PAD), total Aset Pemerintah Daerah, dan Opini audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dapat menjelaskan tentang kekhasan Daerah sebagai pembeda dengan Daerah lainnya. Total aset pemerintah Daerah dan pendapatan pemerintah daerah pada penelitian ini

keduanya diukur menggunakan logaritma natural yang bertujuan untuk mengurangi kemiringan atau Skewness pada data.

KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi jumlah temuan audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) di Indonesia. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini di rumuskan dalam uraian berikut ini:

Insert Gambar 2.1

Jumlah Temuan Audit BPK merupakan jumlah temuan audit yang ditemukan oleh BPK selama tugas pekerjaan lapangan auditnya yang diungkapkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan tahun anggaran 2010

Sedangkan total Aset Pemerintah Daerah, total Pendapatan Pemerintah Daerah, dan opini audit BPK berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) tahun anggaran 2010 yang telah diaudit oleh BPK dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah di Indonesia terhadap Jumlah Temuan Audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD).

Pendapatan Pemerintah Daerah yang diukur dengan Pendapatan Asli Daerah(PAD) menunjukkan kinerja Daerah untuk menghasilkan pendapatannya secara mandiri. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi akan menunjukkan kepada para *stakeholders*-nya bahwa Pemerintah Daerahnya telah menghasilkan kinerja yang baik. Pemerintahan yang menghasilkan kinerja yang buruk dapat disebabkan oleh Sistem Pengendalian Internalnya yang buruk sehingga menimbulkan temuan oleh BPK.

Penelitian yang dilakukan oleh (Doyle, Ge, & McVay, 2007) menemukan bahwa kelemahan material dalam pengendalian internal lebih dimungkinkan bagi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, kurang menguntungkan, produksinya lebih dari satu produk, atau sedang dalam masa pertumbuhan. Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa penentu pada kelemahan material ini bervariasi dalam kekuatan tergantung pada jenis kelemahan yang material diungkapkan. Kelemahan

material dapat menyebabkan kelemahan material lainnya atau kekurangan yang signifikan dalam pengendalian internal, seperti dokumentasi yang tidak memadai proses bisnis dan pengendalian internal. Dengan semakin besarnya ukuran pemerintahan, maka akan semakin besar pula tanggung jawab serta membutuhkan sudut pandang yang lebih luas untuk menkoordinasi dan mengontrol pemerintahan. Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran pemerintahan dengan masalah pengendalian internal. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Johnson et al., 2012) menemukan bahwa komentar pada *Management Letter* berhubungan positif terhadap ukuran pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁= Ukuran Pemerintah Daerah di Indonesia Berpengaruh Positif atau Negatif terhadap Jumlah Temuan Audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2. Pengaruh Total Aset Pemerintah Daerah di Indonesia terhadap Temuan Audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Mustikarini (2012) pada penelitiannya mengatakan bahwa tujuan utama dari program kerja Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar aset Pemerintah Daerah yang dimiliki, maka diharapkan akan semakin tinggi pula kinerja Pemerintah Daerah tersebut untuk dapat melayani masyarakatnya.

Martani (2012) mengatakan bahwa aset merupakan jumlah sumber daya yang dimiliki suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas tersebut. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki, maka semakin besar pula sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih baik. Namun, jumlah aset yang besar sering menjadi kendala dalam melaporkan laporan keuangan bagi Pemerintah di Indonesia karena belum semua aset yang dimiliki Pemerintah dicatat dengan baik dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai. Sehingga dengan demikian, semakin besar jumlah aset yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka potensi salah saji yang material yang dapat menjadi temuan audit akan semakin tinggi pula. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂= Total Aset Pemerintah Daerah di Indonesia Berpengaruh Positif terhadap Jumlah Temuan Audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD).

3. Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Temuan Audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD).

Adanya tuntutan masyarakat untuk menciptakan Pemerintahan yang jujur dan adil membuat Pemerintah Daerah terdorong untuk mengelola Pemerintahan yang lebih baik yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD)-nya. BPK sebagai satu-satunya badan pemeriksa laporan keuangan negara dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Pemerintahan memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara”. BPK bertujuan untuk memberikan pendapat/ opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, a)Kesesuaian dengan standar akuntansi Pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, b)Kecukupan pengungkapan(*adequate disclosure*), c)Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, d)Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pendapat atas kewajaran informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) ini mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan untuk periode selanjutnya. Pendapat atas laporan keuangan ini menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃= Opini Audit BPK Berpengaruh Negatif terhadap Jumlah Temuan Audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD)

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian/Jenis Penelitian, dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah disediakan dan dipublikasikan oleh pihak lain, baik berupa data keuangan maupun data non-keuangan. Data keuangan diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) yang telah diaudit dan dipublikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP). Selain data keuangan, LHP juga menunjukkan data non-keuangan lainnya seperti Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Jumlah Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain data yang disebutkan diatas, peneliti juga mengambil data pendukung lainnya yang berasal dari sumber terkait yang relevan. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel seperti berikut ini:

Insert Tabel III.1

B. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alas statistik regresi berganda karena variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metrik dan nominal(*non-metrik*)(Ghozali, 2006). Regresi berganda digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen yang diukur dengan Jumlah Pendapatan Pemerintah Daerah(β_1), Jumlah Aset Pemerintah Daerah(β_2), dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)(β_3), mempengaruhi Jumlah Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)(Find).

Sesuai dengan kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis di atas maka hipotesis akan diuji dengan persamaan regresi seperti berikut ini:

$$\text{FIND} = \beta_0 + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{ASSET} + \beta_3 \text{OPIN} + \varepsilon$$

Keterangan :

FIND	=Jumlah Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
PAD	= Jumlah Pendapatan Pemerintah Daerah
ASSET	=Jumlah Aset Pemerintah Daerah
OPIN	= Opini BPK
$\beta_1 - \beta_6$	= Koefisien regresi
ε	= <i>error term</i>

Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian parameter regresi simultan (Signifikansi F), pengujian parameter regresi parsial (Signifikansi-t), Pengujian koefisien determinasi (R²), dan Pengujian Asumsi Klasik (Uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia yang terdiri dari 34 Provinsi, 410 Kabupaten, dan 98 Kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Metode pengambilan sampel ini menggunakan kriteria dari peneliti yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten Kota yang menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD)pada tahun 2010 yang telah diaudit oleh BPK dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) yang tersedia dan mencantumkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel dan analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian. Oleh karena itu, sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Insert Tabel IV.1

B. Data dan Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesiayang dipublikasi melalui website resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK-RI) yaitu www.bpk.go.id. Laporan keuangan yang dimaksud terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP).

C. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Asumsi Klasik

Model regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang dipakai menyimpang atau tidak, dan represintatif atau tidak. Pengujian ini berupa uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan uji

multikolinearitas. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria untuk dilakukan pengujian analisis regresi berganda.

2. Analisis Regresi Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, berikut pembahasan mengenai hasil dari pengujian dalam penelitian ini.

a) Model Regresi

Model regresi menunjukkan bahwa *probability value* dari model regresi yang digunakan dalam penelitian lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5% sebesar 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis.

b) Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R^2 sebesar 0,31 atau sebesar 31,0%. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari Opini audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jumlah Aset Pemerintah Daerah, dan Jumlah Pendapatan Pemerintah Daerah mampu menjelaskan variabel dependen jumlah temuan audit BPK sebesar 30,0%. Sementara itu, sisanya sebesar 70,0% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

c) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Hasil pengujian data mengindikasikan bahwa variabel independen dalam penelitian baik Opini audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jumlah Aset Pemerintah Daerah, dan Jumlah Pendapatan Pemerintah Daerah memiliki nilai signifikansi yang berbeda beda.

Nilai sig. untuk variabel Jumlah Aset Pemerintah Daerah yaitu sebesar 0,593 mengindikasikan bahwa model variabel regresi tersebut tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen terhadap jumlah temuan audit BPK. Sedangkan untuk variabel Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,000 secara signifikan mempengaruhi jumlah temuan audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) di Indonesia pada tingkat kepercayaan 5%. Sedangkan variabel jumlah Pendapatan Pemerintah Daerah yang memiliki nilai sig. sebesar 0,072 menunjukkan bahwa nilai variabel tersebut

berada di bawah signifikansi 0,1 yang berarti bahwa variabel jumlah Pendapatan Pemerintah Daerah secara signifikan mempengaruhi jumlah temuan audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) di Indonesia pada tingkat kepercayaan 10% (*Moderate Significant*).

Tanda koefisien regresi yang terdapat dalam penelitian ini keduanya menunjukkan tanda positif, masing-masing adalah sebesar 0,869 untuk variabel Pendapatan Pemerintah Daerah, serta 0,723 untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa besar Jumlah Pendapatan Pemerintah Daerah serta semakin buruknya Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), maka akan semakin tinggi jumlah temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) di Indonesia.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi di atas pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah di Indonesia terhadap Jumlah Temuan Audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD).

Hasil penelitian mengenai pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah di Indonesia terhadap temuan Audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) dalam penelitian ini menunjukkan terdapat adanya pengaruh dengan tingkat signifikansi 10% (*Moderate*). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Johnson & Elder, 2005) yang menemukan bahwa komentar pada *Management Letter* berhubungan positif terhadap ukuran pemerintahan. Namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Doyle, Ge, & McVay, 2007) yang menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran pemerintahan dengan masalah pengendalian internal.

Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa Hipotesis didukung data. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi Pendapatan Pemerintah Daerah yang dimiliki maka semakin tinggi pula temuan Audit BPK. Adanya kecenderungan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah yang tidak semestinya mengakibatkan BPK menemukan temuan audit yang berpotensi terjadinya penyimpangan.

2. Pengaruh Total Aset Pemerintah Daerah di Indonesia terhadap Temuan Audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD).

Hasil penelitian mengenai pengaruh total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah di Indonesia terhadap jumlah temuan audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya pengaruh yang signifikan.

Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa Hipotesis tidak didukung data. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jumlah aset yang dimiliki Pemerintah Daerah di Indonesia pada tahun 2010 bukan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan BPK menemukan temuan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD). Adanya pengukuran aset yang masih sulit dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah(SKPD), mengakibatkan informasi yang mengungkapkan tentang aset pada laporan keuangan kurang dapat diandalkan.

3. Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Temuan Audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD).

Hasil penelitian mengenai pengaruh opini BPK atas temuan audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) di Indonesia dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh yang signifikan.

Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa Hipotesis didukung data. Hal ini dapat dijelaskan bahwa opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) di Indonesia pada tahun 2010 merupakan salah satu faktor Temuan audit BPK pada Pemerintah Daerah untuk mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD)nya. Opini audit BPK yang semakin buruk secara langsung akan meninggalkan beberapa catatan buruk kepada Pemerintah Daerah atas Sistem Pengendalian Internalnya dan menjadikannya sebagai temuan audit oleh BPK. Dengan kata lain, semakin buruk Opini Audit BPK, maka akan semakin banyak temuan audit yang ditemukan oleh BPK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai determinan dan hubungannya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di

Indonesia tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bukti bahwa jumlah temuan audit BPK dipengaruhi secara signifikan dan signifikan secara moderat oleh 2 dari 3 variabel penelitian. Variabel-variabel tersebut diantaranya adalah pendapatan pemerintah daerah, dan opini audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan variabel jumlah aset pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap jumlah temuan audit BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2010.

B. Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan yang menyertainya, dimana dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2010. Hal ini dikarenakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2010 merupakan tahun terakhir sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2011 yang merupakan konvergensi dari penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Alasan lain peneliti menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010 ini juga untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah di Indonesia untuk menuju penerapan *full accrual basis* tahun 2015 dimana pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010 ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 tahun 2005 yang merupakan standar akuntansi pemerintahan kas menuju akrual.

Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2010 yang dapat diakses oleh peneliti. Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak dapat diakses lainnya diantaranya dikarenakan data telah rusak, hilang, atau terhapus karena kesalahan teknis sehingga mengurangi sampel penelitian. Dikarenakan hal inilah hasil penelitian ini kurang dapat mewakili secara keseluruhan populasi kejadian yang sebenarnya mengenai determinan dan hubungannya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2010.

C. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar menggunakan pengukuran yang lebih tepat lagi dalam mengukur determinan dan hubungannya terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2010 dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baru, yaitu PP No.71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang akan menerapkan *full accrual basis* pada tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, J., Gaynor, L. M., & Wright, A. (2006). Auditor Communications with the Audit Committee and Board: Policy Recommendations and Opportunities for Future Research Jeffrey, (April).
- Doyle, J., Ge, W., & McVay, S. (2007). Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 44(1-2), 193–223.
- Eisenhardt, M. K. (1989). Agency theory An Assesment and Review. *Academy of Management Review*.
- Ge, W., & Mcvay, S. (2005). after the Sarbanes-Oxley Act, 19(3), 137–158.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (n.d.). Theory of the Firm: Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm: Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure.
- Johnson, L. E., & Elder, R. J. (2005). Auditor Specialization and Perceived Audit Quality, Auditee Satisfaction and Audit Fees in Local Government Audit Market, 1271(970).
- Johnson, L. E., Lowensohn, S., Reck, J. L., & Davies, S. P. (2012). J . Account . Public Policy Management letter comments : Their determinants and their association with financial reporting quality in local government. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(6), 575–592.
- Manson, S., McCartney, S., & Sherer, M. (2001). The Value of Management Letters to Unlisted Companies. *The British Accounting Review*, 33(4), 549–568. doi:10.1006/bare.2001.0183
- Mardiasmo(2002). Akuntansi Sektor Publik;Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Martani, Dwi dan Annisa Lestari(2012). Local Government Financial Statement Disclosure in Indonesia. 2010 Annual Meeting and Conference Asian Academic Accounting Association (AAAA) November 28 – December 1, 2010 The Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand Hosted By hammasat Business School.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriyanti(2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007.Universitas Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:Departemen Dalam Negeri RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003. Jakarta:Departemen Dalam Negeri RI.